



Siti Aisyah (tengah) bersama ayah dan ibunya sesuai penyerahan secara resmi dari Pemerintah Indonesia kepada pihak keluarga di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (11/3/2019). Siti Aisyah, yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, dibebaskan dari tuntutan setelah jaksa membatalkan tuntutan terhadap Siti.

Membumikan Diplomasi yang Berdampak

Pembebasan ratusan WNI dari hukuman mati sampai kesepakatan dagang bernilai miliaran dollar AS adalah pencapaian nyata diplomasi Indonesia. Jakarta juga bergerak untuk menangani masalah bersama yang dihadapi warga dunia.

Kris Mada

Diplomasi Indonesia tahun 2019 bukan hanya tentang pembebasan Siti Aisyah atau keterpilihan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diplomasi, sebagai salah satu penerapan politik luar negeri, juga diwarnai serangkaian perundingan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Kementerian Luar Negeri RI menetapkan delapan sasaran strategis periode 2015-2019. Kedelapan sasaran itu meliputi diplomasi maritim yang kuat, kepemimpinan Indonesia yang meningkat di ASEAN, peningkatan peran Indonesia di level internasional, diplomasi ekonomi yang kuat, pelayanan dan perlindungan kepada WNI dan diaspora di luar negeri, kebijakan luar negeri yang berkualitas, dukungan dan komitmen nasional pada kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional, serta pemantauan hasil diplomasi.

Perwujudan sasaran itu, antara lain, berupa pembebasan WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina. Indonesia juga membebaskan total 461 WNI dari hukuman mati di negara lain, seperti Martini Warnah, dan tentu saja Siti Aisyah. Di sejumlah negara, diplomat Indonesia merundingkan perjanjian yang lebih memberikan perlindungan bagi diaspora dan pekerja migran Indonesia.

Selain itu, diplomasi maritim juga menjadi prioritas karena Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Kejelasan perbatasan laut bukan sekedar kedaulatan atau potensi ekonomi. Dampak paling nyata akibat ketidakjelasan itu, adalah ketidaktepatan bolak-balik baku tangkap nelayan masing-masing. Bahkan, aparat Indonesia pun pernah diperiksa di negara tetangga karena ketidakjelasan perbatasan laut. Kasus Ambalat beberapa tahun lalu juga karena perbatasan laut.

Dari rangkaian perundingan

sejak 1971, hanya dengan Australia dan Singapura yang relatif rampung. Urusan dengan Australia terkendala ratifikasi oleh parlemen. Adapun urusan dengan Singapura terhambat sejumlah karang yang diperebutkan Malaysia dan Singapura di utara Bintan. Tidak ada perundingan perbatasan selama meraka masih berebut.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi hampir selalu membahas perkara batas maritim dengan para sejawatnya di negara tetangga. Di masa jabatan keduanya, masalah itu masih masuk agenda kerja Retno.

Diplomasi ekonomi

Para perunding Indonesia juga harus menjaga stamina merundingkan perjanjian ekonomi. Setelah bertahun-tahun, Indonesia merampungkan perundingan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Korea Selatan. Jakarta-Seoul kini berusaha menyelesaikan naskah akhir CEPA itu.

Adapun dengan Uni Eropa (UE) dan banyak wilayah atau negara lain, perundingan CEPA masih jauh dari selesai. Perundingan CEPA dengan UE malah diwarnai baku gugat Jakarta-Brussels di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) gara-gara sawit dan nikel. Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Picket memang menyebut urusan gugatan tidak akan memengaruhi perundingan CEPA. Selain berunding, korps diplomatik Indonesia juga berusaha membuka pasar baru untuk produk-produk Indonesia. Setelah diplomasi ekonomi sempat dikurangi semasa Menlu Hassan Wirajuda, Kemlu kembali menguatkan bagian diplomasi ekonomi di masa Retno. Belakangan, Kemlu mempunyai tiga jalur koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum,

dan Keamanan (untuk diplomasi selain ekonomi) serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Koordinator Perekonomian (untuk diplomasi ekonomi).

Dalam pengarahannya kepada para duta besar dan konsul jenderal RI beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menekankan soal diplomasi ekonomi. Para diplomat Indonesia diminta ikut mencari data potensi pasar dan memasarkan produk Indonesia di luar negeri.

Perang dagang, pelambatan ekonomi global, dan defisit neraca perdagangan adalah sejumlah alasan yang memicu permintaan itu. Salah satu resep terbaik mengatasi defisit adalah meningkatkan ekspor. Menjalin CEPA dan membuka pasar baru merupakan bagian dari upaya memacu ekspor.

Sejumlah pihak menilai, konsentrasi pada diplomasi ekonomi merupakan gambaran pragmatisme politik luar negeri Indonesia di era Jokowi. Selama lima tahun memimpin, Jokowi menekankan, diplomasi harus membawa dampak nyata.

Presiden aktif dalam forum-forum bilateral atau multilateral yang tidak luas. Setiap kali hadir di Konferensi Tingkat Tinggi G-20, APEC, atau ASEAN, Jokowi menggelar aneka pertemuan bilateral dengan sejawatnya dari negara lain.

Namun, untuk forum besar, seperti Sidang Majelis Umum PBB, belum sekali pun Jokowi hadir. Bahkan, ia tetap tak hadir pada tahun pertama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Padahal, keterpilihan sebagai anggota DK PBB dan lalu Dewan HAM PBB adalah wujud pencapaian sasaran strategis kebijakan luar negeri Indonesia.

Diplomat senior dan Menlu periode 2009-2014, Marty Natalegawa, mengingatkan, diplomasi bukanlah aktivitas dengan

hasil serta-merta. Butuh waktu dan proses panjang sebelum kepercayaan lintas negara terbangun. Dukungan negara-negara Pasifik kepada Indonesia dalam masalah Papua pun merupakan hasil diplomasi selama bertahun-tahun.

Peran di ASEAN

Marty juga mengingatkan pentingnya menjaga kepemimpinan Indonesia di ASEAN. "Saat Indonesia tidak melibatkan diri, ASEAN tidak berkembang," kata Marty.

Indonesia memang masih menjaga peran di ASEAN. Adopsi Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik adalah hasil kerja keras diplomat Indonesia. Jakarta meyakinkan para mitranya agar ASEAN mempunyai pandangan sendiri di tengah lontaran konsep Indo-Pasifik oleh negara-negara besar.

Indonesia juga mendorong ASEAN agar lebih banyak menggelar pertemuan di Jakarta dengan menyediakan gedung sekretariat baru. Tanpa banyak disorot, Indonesia terus mendekati Myanmar soal Rohingya. Jakarta memilih tak berbicara keras. Indonesia mengirimkan aneka bantuan kepada Rohingya.

"Indonesia menghindari *megaphone diplomacy*," ujar Teuku Faizasyah, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, soal kebijakan dan sikap Indonesia pada beberapa isu sensitif, seperti Rohingya dan Uighur.

Pilihan sikap itu dinilai tidak menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai negara besar. Indonesia tergabung dalam G-20, organisasi negara pengontrol 85 persen perekonomian global, meskipun masih sebagai negara kelas menengah. Status ini membuat nasihat Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama yang juga pernah menjabat Menlu, soal kebijakan luar negeri Indonesia tetap relevan: "pandai mengayuh di antara karang".

LAPORAN AKHIR TAHUN

ASEAN, Pandangan Indo-Pasifik, dan Upaya Mendamaikan Kawasan

Sepanjang tahun 2019, istilah Indo-Pasifik menjadi salah satu pokok hubungan antarnegara di sekitar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sejumlah pihak menyampaikan tafsiran masing-masing atas istilah itu. Dibutuhkan jalan tengah untuk mempertemukan dan membunikan konsep-konsep itu.

"Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, AOIP) adalah upaya menempatkan sudut pandang ASEAN pada strategi Indo-Pasifik," kata Thomas Daniel, peneliti hubungan internasional pada Institute of Strategic and International Studies (ISIS), Malaysia. "ASEAN mencoba menghindari pertentangan walau tak dapat ditampilkan ada perbedaan tentang cara mengelola pandangan berlainan pada pemangku kepentingan atas masa depan kawasan."

Kepala Kajian ASEAN The Habibie Center Ahmad Ibrahim Almuttaqi mengatakan, ASEAN sudah tepat menghasilkan AOIP yang menekankan pada penghormatan hukum, kerja sama, dan pembiasaan dialog. AOIP kembali menunjukkan keinginan ASEAN untuk tetap menjaga keseimbangan di kawasan penuh dinamika ini.

Thomas dan Ibrahim sepakat, tidak mudah bagi ASEAN menjalankan perannya di tengah persaingan negara-negara besar. Ruang untuk menjalankan peran itu semakin kecil. Ibrahim menekankan pada persaingan negara-negara besar yang mencoba mendominasi kawasan.

Stephen Nagy, pengajar International Christian University, Jepang, menyatakan, negara-negara besar di kedua samudra punya konsep masing-masing soal Indo-Pasifik. Jepang menekankan pandangan Indo-Pasifik pada kerja sama infrastruktur, keterhubungan antarnegara, dan perilaku berdasar aturan di lautan. Jepang tak mau pandangannya tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (FOIP) bertentangan dengan China.

"Pertumbuhan ekonomi Jepang dan kestabilan kawasan tak mungkin terwujud jika hubungan China-Jepang tidak diamankan," tulis Nagy dalam artikel di *The Japan Times*.

Sorotan bagi AS-China

Dalam pandangan Indo-Pasifik yang diartikan Kement-

rian Luar Negeri AS pada November 2019, Washington menekankan kedaulatan dan kemerdekaan setiap bangsa; penyelesaian sengketa secara damai; perdagangan bebas, adil, dan imbal balik berdasarkan investasi bebas, kesepakan transparan; serta kepatuhan pada hukum internasional, termasuk kebebasan berlayar dan terbang.

Atas nama kebebasan berlayar, kapal-kapal perang AS bolak-balik melintas di dekat perairan di sekitar pulau-pulau yang diklaim China di Laut China Selatan. Masalahnya, Washington tidak hanya menerapkan kebebasan berlayar di Laut China Selatan. "Konsep AS soal kebebasan berlayar menyulitkan kawan dan lawan. AS menerapkan konsep itu (untuk berlayar tanpa izin) di perairan negara yang bersahabat (dengan AS), seperti India, Indonesia, Vietnam, dan Filipina," tulis Sujan R Chinoy, diplomat senior yang kini menjadi Direktur Jenderal Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), India, di *The Indian Express*.

Ia menyoroti pernyataan AS yang bolak-balik mengklaim bertindak berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Padahal, AS tidak meratifikasi konvensi itu sampai sekarang. Dalam tatanan hukum internasional, negara yang tidak meratifikasi suatu konvensi tidak bisa diikat, apalagi ditindak, dengan aturan dalam konvensi itu.

"Bagi negara besar, menghormati ketertiban berdasarkan aturan adalah pilihan, bukan keharusan. China dan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kerap melanggar hukum internasional. Padahal, mereka mendapat kepercayaan menjaga perdamaian dan keamanan internasional," tulis Brahma Chellaney, pakar kajian strategis India, di *The Japan Times*.

Chellaney berpendapat, Indo-Pasifik tertib berdasar aturan internasional amat diperlukan. Sementara Nagy menekankan bahwa Indo-Pasifik tidak boleh dimaknai berdasarkan persaingan AS-China semata. Negara-negara lain harus mendorong pendekatan yang menekankan kerja sama dan melunakkan persaingan AS-China.

Kerja sama konkret

Pengajar politik internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu, mengatakan, Indo-Pasifik hanya akan bermakna jika diterapkan pada kerja sama konkret. "Paling dekat adalah bagaimana menyambungkan konsep keterhubungan maritim yang diajukan setiap negara besar. Semua, pada prinsipnya, punya kesamaan tentang bagaimana membangun jalur logistik lintas negara," ujarnya.

Meski bersaing satu sama lain, AS, Jepang, China, dan Korsel menawarkan program pengembangan infrastruktur di Indo-Pasifik. Negara-negara lain tidak perlu terjebak untuk memihak salah satu di antara mereka. Justru tawaran itu harus dimanfaatkan negara-negara di kawasan. Persaingan negara-negara besar tidak bisa dihindari.

Kerja sama infrastruktur juga bisa menjadi cara perwujudan konsep Indo-Pasifik. Inisiatif Indonesia untuk menggelar dialog kerja sama infrastruktur Indo-Pasifik adalah salah satu pelantar yang dapat dioptimalkan. "Tidak perlu berkonsentrasi pada penafsiran Indo-Pasifik. Lebih penting mencari cara menerapkan konsep itu agar membawa manfaat bagi warga di kawasan," tutur Alexius.

Nagy juga berpendapat senada. Bahkan, ia menyarankan bentuk lebih praktis. Kerja sama infrastruktur Indo-Pasifik tidak hanya soal mengirimkan bahan baku dan peralatan untuk membangun infrastruktur. Tidak kalah penting untuk mengirimkan pengacara dan akuntan yang akan membantu memastikan proyek-proyek dalam kerja sama itu berkelanjutan dan membawa manfaat. Negara-negara menengah juga dapat bekerja sama membangun tata kelola, tata tertib berbasis hukum, dan keterampilan untuk mengelola infrastruktur.

(KRIS MADA)



Saat menjabat Wakil Presiden Jusuf Kalla (depan, tengah), Menlu Retno LP Marsudi (depan, keempat dari kanan), dan perwakilan dari sejumlah negara sahabat menghadiri pembukaan High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation, Rabu (20/3/2019), di Jakarta. Tiga bulan kemudian, ASEAN mengadopsi pandangan Indo-Pasifik yang diinisiasi Indonesia di Bangkok, Thailand.

KILAS LUAR NEGERI

Boeing Copot Dennis Muilenburg dari Jabatan CEO

Keruwetan yang melanda Boeing kembali menelan korban. Produsen pesawat asal Amerika Serikat itu mengumumkan pemecatannya Dennis Muilenburg dari kursi CEO. Dalam pernyataan pada Senin (23/12/2019) waktu Washington, Boeing menyatakan, perubahan kepemimpinan diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan kepada perusahaan. "Agar hubungan dengan regulator, pelanggan, dan semua pemangku kepentingan bisa diperbaiki lagi," demikian pernyataan Boeing. Perusahaan itu menyebut, pengambil keputusan mereka tidak lagi dipercayai regulator dan pelanggan. Boeing dililit masalah setelah dua unit produk terburunya, 737-Max 8, jatuh dan menewaskan semua orang yang diangkutnya. Insiden itu terjadi karena kesalahan Boeing. Saham Boeing anjlok dan perusahaan itu merugi miliaran dollar AS. Produksi Max 8 dihentikan terkait dua kecelakaan di Indonesia dan Etiopia. Sampai kini, pesawat itu dilarang terbang. (AP/RAZ)

Erdogan Bahas Libya dengan Presiden Tunisia

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melawat ke Tunisia, Rabu (25/12/2019). Dalam kunjungan dadakan itu, Erdogan dan Presiden Tunisia Kais Saied membahas langkah gencatan senjata dan perundingan di Libya. Sejumlah menteri dan pejabat Turki mendampingi Erdogan dalam lawatan itu. Sejak 2011, Libya terperangkap perang saudara. Kini, kekuatan utamanya adalah Pemerintahan Nasional Libya (GNA) yang berkedudukan di Tripoli dan Tentara Nasional Libya (LNA) yang berkedudukan di Benghazi. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengakui GNA. Sejak April 2019, LNA menyerang Tripoli untuk mengambil alih ibu kota Libya itu dari GNA. Bersama Qatar, Turki juga mendukung GNA. Sementara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan sejumlah negara Barat mendukung LNA. Di Tunisia, Erdogan kembali menyatakan siap mengirim tentara ke Libya jika diminta GNA. Pekan lalu, Ankara mengesahkan perjanjian dengan GNA. (AP/RAZ)